

## **ABSTRAK**

Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat akta autentik dan terikat pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. UUJN tidak mengatur mengenai batas kewajaran dalam pembuatan akta, sedangkan Kode Etik Notaris mengatur mengenai batas kewajaran yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat No. 1 Tahun 2017 yang menetapkan batas maksimal dalam pembuatan yaitu 20 (dua puluh) akta per hari. Penelitian ini merumuskan 2 (dua) permasalahan yaitu alasan adanya pembatasan kewajaran dalam pembuatan akta serta keselarasan pengaturan berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris, tujuan penelitian untuk mengetahui alasan adanya pembatasan serta menilai keselarasan pengaturan antara UUJN dan Kode Etik Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewajaran bertujuan untuk menjaga kualitas, ketelitian dan keautentikan akta, karena pembuatan akta secara berlebihan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dan kesalahan pemenuhan syarat formil. Pembuatan akta harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas kepatutan dan kepatantasan, karena setiap akta mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda sehingga membutuhkan waktu dan perhatian yang tidak sama dalam proses penyusunannya. Pengaturan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris tidak bertentangan melainkan menunjukkan adanya keselarasan dari segi tujuan dan fungsi pengaturannya. UUJN memberikan dasar hukum kewenangan Jabatan Notaris, sedangkan Kode Etik Notaris mengarahkan bagaimana kewenangan dijalankan secara profesional. Pembatasan kewajaran dalam pembuatan akta sebaiknya tidak hanya dipahami dari aspek kuantitas jumlah akta, tetapi juga pada aspek kualitas pelaksanaan jabatan. Diperlukan peningkatan kesadaran untuk mengelola beban pekerjaan agar prinsip kehati-hatian tetap terjaga serta didukung pedoman yang lebih jelas sebagai acuan dalam menilai batas kewajaran pembuatan akta.

**Kata Kunci: Notaris; Batas Kewajaran; UUJN; Kode Etik Notaris.**

## **ABSTRACT**

*A notary is a public official authorized to make authentic deeds and is bound by the Notary Law (UUJN) and the Notary Code of Ethics. UUJN does not regulate the limits of reasonableness in making deeds, while the Notary Code of Ethics regulates the limits of reasonableness which are then strengthened by the Central Honorary Council Regulation No. 1 of 2017 which sets a maximum limit of 20 (twenty) deeds per day. This study formulates 2 (two) problems, namely the reasons for the limitations of reasonableness in making deeds and the harmonization of regulations based on UUJN and the Notary Code of Ethics, the purpose of the study is to determine the reasons for the limitations and assess the harmonization of regulations between UUJN and the Notary Code of Ethics. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the limitations of reasonableness aim to maintain the quality, accuracy and authenticity of deeds, because excessive making of deeds has the potential to cause inaccuracy and errors in fulfilling formal requirements. The preparation of deeds must be carried out based on the principles of propriety and appropriateness, because each deed has a different level of difficulty, thus requiring different amounts of time and attention in the preparation process. The provisions in the UUJN and the Notary Code of Ethics are not contradictory but rather demonstrate harmony in terms of the objectives and functions of their regulations. The UUJN provides the legal basis for the authority of the Notary Office, while the Notary Code of Ethics directs how this authority is exercised professionally. The limits of reasonableness in the preparation of deeds should not only be understood in terms of the quantity of deeds, but also in terms of the quality of the performance of the position. Increased awareness is needed to manage workloads so that the principle of prudence is maintained, supported by clearer guidelines as a reference in assessing the limits of reasonableness in the preparation of deeds.*

**Keywords:** *Notary; Reasonable Limits; UUJN; Notary Code of Ethics.*